



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2024



STASIUN PSDKP BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nyalah Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2024 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di triwulan I Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 12 April 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H

NIP. 19830730 200801 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan triwulan I Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama triwulan I tahun 2024.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 8 Sasaran Kegiatan , yaitu:

1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif;
2. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif;
3. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan;
4. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan;
5. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas;
7. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas;
8. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2024, terdapat 25 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai NKO 106,96. Selama triwulan I Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan perhitungan atas capaian 9 indikator

kinerja, dimana 16 indikator lainnya belum dilaksanakan perhitungan dan baru akan dihitung ketika semester 1 ataupun tahunan sebagaimana mekanisme penilaian terhadap indikator kinerja dimaksud. Berikut capaian atas 9 indikator kinerja:

1. Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 91 dan capaian sebesar 97,20;
2. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 91 dan capaian sebesar 100;
3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%) dengan target 100% dan capaian sebesar 100%;
4. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
5. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
6. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 40 dan capaian sebesar 80;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan dengan target 80 dan capaian 88,04;
8. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%) dengan target 100% dan capaian sebesar 100%;
9. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan dengan target 94% dan capaian sebesar 120%.

Realisasi anggaran pada triwulan I Tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 42,08% atau sebesar Rp **14.626.681.021,-** (*Empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua puluh satu rupiah*) dari alokasi anggaran Rp **34.759.850.000,-** (*Tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja guna mendorong pencapaian target pada tahun berikutnya.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I.....	8
PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Maksud dan Tujuan.....	9
C. Isu AkBelawan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	9
D. Data Umum Organisasi	10
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	14
BAB II.....	15
PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024.....	15
B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2020 – 2024.....	17
C. Program Kerja Pengawasan SDKP	17
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
E. Pengukuran Capaian Kinerja	21
BAB III.....	22
AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2024 22	
1. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2024	22
2. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 Tahunan.....	22
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	25
1. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	25
2. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	35
3. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan.....	49
4. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas.....	56
5. Sasaran kinerja 8: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	59
C. Realisasi Anggaran	64

BAB IV.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran dan Rekomendasi.....	65

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Armada Kapal Pengawas dan <i>Speedboat</i> siap operasi	13
Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja	14
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024.....	19
Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2024.....	23
Tabel 5. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2024	24
Tabel 6. Capaian IK 2.....	27
Tabel 7. Perhitungan Capaian IKU 2	28
Tabel 8. Capaian IKU 3	31
Tabel 9. Perhitungan capaian IKU 3	31
Tabel 10. Realisasi armada speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	33
Tabel 11 Capaian IK 4.....	34
Tabel 12. Tahapan pemeriksaan IKU 7.....	36
Tabel 13. Capaian IKU 7.....	36
Tabel 14. Rekap pemeriksaan SDK triwulan I	38
Tabel 15. Rekap Pengawasan Pencemaran.....	39
Tabel 16. Rekap Pengawasan PRL	44
Tabel 17. Rekap pengawasan jenis ikan dilindungi.....	47
Tabel 18. Pemeriksaan IKU 8.....	50
Tabel 19. Capaian IKU 8.....	50
Tabel 20 Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan	52
Tabel 21 Rekapitulasi Penerbitan SLO	52
Tabel 22. Rekap Pengawasan Pengolahan.....	53
Tabel 23. Rekap Pengawasan Distribusi/ Pemasaran	53
Tabel 24. Rekap pengawasan budidaya	55
Tabel 25. Capaian IKU 9.....	57
Tabel 26. Rekap penerbitan sanksi administratif.....	58
Tabel 27. Capaian IK 12.....	61
Tabel 28. Capaian IK 15.....	62
Tabel 29. Capaian IK 21.....	63
Tabel 30. Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Periode Tahun 2024.....	65

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan	12
Gambar 2 Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	13
Gambar 3 Sistematisa Penyusunan Lkj Stasiun PSDKP Belawan	14
Gambar 4. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) triwulan I, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawasan SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap Tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap Tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di Wilayah Stasiun PSDKP Belawan;
- b. Adanya dugaan kegiatan *transshipment* di laut;
- c. Tidak terpantaunya kapal – kapal perikanan melalui radar VMS;
- d. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan.
- e. Masih terdapat kegiatan penangkapan yang merusak.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- b. Masih terdapatnya pelaku usaha yang belum memiliki CBIB dan CPIB.
- c. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPR.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Masih terdapatnya UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP.

4. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

- a. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki izin PKKPR.
- b. Penambangan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautandan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

a. Kepala Stasiun:

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Umum:

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

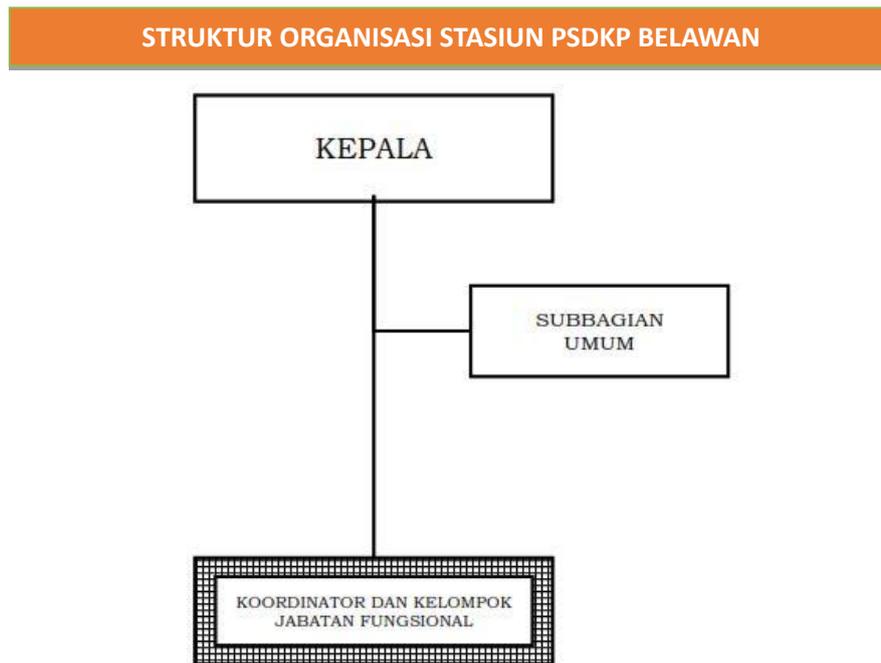
c. Kelompok Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

f. Satuan Pengawasan SDKP:

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-

masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 5 (lima) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 9 (sembilan) Wilayah Kerja (Wilker) sebagaimana Struktur Organisasi pada Gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1 Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 Propinsi (Aceh, Sumatera Utara dan Riau) dan 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 571, meliputi perairan Selat Malaka. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2 Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Dalam pelaksanaan operasional pengawasan di wilayah kerja, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan membawahi 3 Satuan Pengawasan SDKP, yaitu:

- 1) Satuan Pengawasan SDKP Asahan
- 2) Satuan Pengawasan SDKP Langsa
- 3) Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir
- 4)

4. Armada Pengawas dan *Speedboat* Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Berikut data kapal pengawas dan *speedboat* pengawas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Armada Kapal Pengawas dan *Speedboat* siap operasi

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Lokasi / Stasiun
1	Hiu 01	28 Meter	Stasiun PSDKP Belawan
2	Hiu 08	28 Meter	Stasiun PSDKP Belawan
3	Hiu 16	32 meter	Stasiun PSDKP Belawan
4	Napoleon 028	12 meter	Stasiun PSDKP Belawan
5	Dolphin 014	8 Meter	Satwas Asahan

Sumber: Bagian Operasi Armada Stasiun PSDKP Belawan

5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai Tahun 2024 sebanyak 151 orang, yang terdiri dari PNS Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 86 orang, 5 orang PPPK dan tenaga kontrak sebanyak 51 orang, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	PNS	PPPK	Tenaga Kontrak	Jumlah (Orang)
1	Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	27	4	13	44
2	Satuan Pengawasan SDKP Langsa	3	1	1	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Idi	3	-	1	4
	- Wilker Pengawasan SDKP Lhokseumawe	1	1	-	2
	- Wilker Pengawasan SDKP Biureun	1	-	-	1
	- Wilker Pengawasan SDKP Sigli*	-	-	-	-
3	Satwas Pengawasan SDKP Asahan	5	3	4	12
	- Wilker Pengawasan SDKP Batubara*	-	-	1	1
4	Satuan Pengawasan Rokan Hilir	3	-	2	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Panipahan	-	-	1	1
	-Wilker Pengawasan SDKP Dumai	1	-	1	2
	-Wilker Pengawasan SDKP Kep. Meranti	2	-	-	2
	-Wilker Pengawasan SDKP Indragiri Hilir	2	-	-	2
5	KP. Hiu 01	11	-	1	12
5	KP. Hiu 08	11	-	1	12
7	KP. Hiu 16	10	-	2	12
	Total	80	9	29	117

Sumber: Bagian Kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha Stasiun PSDKP Belawan

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3 Sistematika Penyusunan Lkj Stasiun PSDKP Belawan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020 - 2024; ⁽²⁾Manual Indikator Kinerja Tahun 2024; ⁽³⁾Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024; ⁽⁴⁾Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020 - 2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020 - 2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP periode 2020 – 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :
"Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan"

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2020 - 2024 menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan yaitu memadu serasikan kebijakan pusat dan UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah pemokusan kegiatan pengawasan kepada perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun visi dan misi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Sasaran : Indonesia bebas *illegal fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

C. Program Kerja Pengawasan SDKP

1. Program

Program merupakan instrument kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2020 – 2024 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;

- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Stasiun PSDKP Belawan.

Selain kegiatan di atas Stasiun PSDKP Belawan juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 khususnya pada kebijakan "membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan". Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024, ditetapkan yaitu "Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan". Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 strategi *implementatif* yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		6. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
	dan Perikanan yang tuntas	10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan PerikananLingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	93
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
		13. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75
		14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	70
		15. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		16. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	82
		17. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	84
		18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		19. Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	21
		20. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1
		21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	94
		22. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		23. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		24. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	93,76
25. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	82		

E. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2024

1. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja yang terdiri atas 11 IKU dan 14 IKM. Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Stasiun PSDKP Belawan sebesar 106,96% untuk triwulan I, capaian dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 4. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan
Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Stasiun PSDKP Belawan dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 25 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 Tahunan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya pada Tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja. Capaian kinerja triwulan I Tahun 2024 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
					2024	MARET	MARET	
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif						0	
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	0		0
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						104,78	
2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91	91	97,2	106,81
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91	91	100	109,89
4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						0	
5	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		0
6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		0
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan						100	
7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan						100	
8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas						120	
9	Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	40	80	120
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		0
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas						0	
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan PerikananLingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93	0		0
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP						110,02	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	88,04	110,05
13	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	0		0
14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	0		0
15	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pengawasan SKDP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100

16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	0		0
17	Penilaian Mandiri SAKIP SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	0		0
18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		0
19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	21	0		0
20	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0		0
21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	94	120	120
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		0
23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		0
24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	0		0
25	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	0		0

Pada triwulan I tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan menetapkan 25 Indeks Kinerja dan dalam aktualisasinya 9 IK dilaksanakan dengan kriteria 6 IK dengan predikat baik, 3 IK dengan predikat istimewa. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang triwulan I tahun 2024. Realisasi anggaran pada triwulan I Tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 42,08% atau sebesar Rp **14.626.681.021,-** (*Empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua puluh satu rupiah*) dari alokasi anggaran Rp **34.759.850.000,-** (*Tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

Tabel 5. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	16.184.016.000	9.946.383.863	61,46%
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	849.000.000	106.202.668	12,51%
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	512.707.000	108.512.762	21,16%
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.072.000.000	152.427.250	14,22%
5	Dukungan Manajemen	16.142.127.000	4.313.154.478	26,72%
Total		34.759.850.000	14.626.681.021	42,08%

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 9 indeks kinerja yang dapat dicapai oleh Stasiun PSDKP Belawan pencapaian terhadap evaluasi dan analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Sasaran Kegiatan kedua menghasilkan 3 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan diantaranya;

1. Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
2. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)

Kondisi ini tidak berbeda dengan penetapan perjanjian kinerja pada tahun 2023. Penjabaran sasaran kegiatan pada 3 indikator kinerja telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi Stasiun PSDKP Belawan dalam melakukan pengelolaan terhadap armada yaitu Kapal Pengawas Hiu 01, Kapal Pengawas Hiu 08 dan Kapal Pengawas Hiu 16, dalam melakukan pengawasan pada WPPNRI 571.

a. IKU 2: Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)

Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan salah satu indikator kinerja yang dipakai untuk menentukan sejauh mana Stasiun PSDKP Belawan mengoptimalkan armada pengawasan dalam hal ini kapal pengawas di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan terutama di WPP NRI 571. Secara sederhana dalam informasi indikator kinerja IKU ini didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;

- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

- Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas
- Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
- Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas
- Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali)]: Bobot 30%, Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]
- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 unit kapal ikan per hari dan 1 objek kelautan per periode operasi.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Selama triwulan I tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan berhasil memperoleh capaian **97,20** dengan persentasi **106,81%** sampai dengan akhir triwulan I tahun 2024 dari target triwulan I sebesar **91**. Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 6. Capaian IK 2

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I 2024	2024	TW I 2024	s/d TW I	TW I 2023
Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	91	91	97,20	97,20	100

Jika dilihat pada tabel yang tersaji di atas maka capaian indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan telah mencapai target. Perhitungan atas capaian indeks kinerja ini kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Perhitungan Capaian IKU 2

No	Satker	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)			Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I								
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai			
1	Stasiun PSDKP Belawan	KP. HIU 01	30	43	70,00	0	0	30	40	0,02	0,03	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	100,00	97,20				
		KP. HIU 08	30	21	49,00	0	0	30	31,6	0,02	0,03	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	91,60					
		KP. HIU 16	51	51	70,00	0	0	30	40	0,10	0,22	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	100,00					

Analisa penyebab tercapainya target TW I pada IKU 2 ini karena :

1. Perencanaan hari operasi kapal pengawas yang baik.
2. Terlaksananya perawatan kapal pengawas dengan baik sehingga kegiatan terlaksana dengan baik.
3. Monitoring terhadap kegiatan dan penyelesaian laporan kegiatan dilaksanakan dengan baik.

Selama Triwulan I, KP Hiu 01 telah melaksanakan 10 hari operasi, KP Hiu 08 telah melaksanakan 10 hari operasi dan KP Hiu 16 telah melaksanakan 12 hari operasi. Realisasi anggaran untuk operasional kapal pengawas sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah sebesar Rp.9.771.833.729 atau sekitar 87,38% dari total pagu sebesar Rp.11.182.856.000.

b. IKU 3: Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan indeks kinerja yang dipakai untuk mengukur optimalitas dari armada *speedboat* yang berada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot} (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp	=	Indeks kinerja Speedboat Pengawas
Bobot (%)	=	Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	=	Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
Target	=	Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot} (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp	=	Indeks kinerja Speedboat Pengawas
Bobot (%)	=	Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	=	Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
Target	=	Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan atau objek kelautan per hari.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
 - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%

- Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Dalam kurun waktu sampai akhir triwulan I tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan operasi *speedboat* pengawasan yang berada dan tersebar diseluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Capaian yang diperoleh sebesar **100** dengan persentase sebesar **109,89%** dari **target sebesar 91 pada triwulan I 2024**. Capaian indeks kinerja dimaksud kami sajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 8. Capaian IKU 3

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2024	TW I	s/d	TW I
			2024	TW I	2023
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	91	91	100	100	100

Selama triwulan I tahun 2024 capaian indeks kinerja operasi speedboat melebihi target yang ditentukan yaitu 91, walaupun jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 mengalami penurunan. Perhitungan terhadap capaian indeks kinerja speedboat disajikan sebagaimana tabel berikut

Tabel 9. Perhitungan capaian IKU 3

Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)			Dukungan Operasi Bersama (20%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
		TW I			TW I			TW I	TW I			TW I			TW I	TW I			TW I			TW I								
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai		
Stasiun PSDKP Belawan	Dolphin 14	9	10	50	0	0	50	40	0,000025	0,000025	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100	100
	Napoleon 28	2	6	50	0	0	50	40	0,000026	0,000026	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100	

Analisa penyebab keberhasilan capaian IKU dimaksud, diantaranya:

1. Menyusun rencana pengawasan yang matang dan tepat sasaran, rencana pengawasan dengan speedboat dilaksanakan dengan memperhitungkan data pengawasan terdahulu sebagai informasi awal dalam penetapan RO;
2. Melakukan pemetaan terhadap wilayah operasi, hal ini dimaksudkan agar memudahkan menentukan target operasi ataupun potensi wilayah pengawasan baik pengawasan perikanan maupun kelautan;
3. Memenuhi kebutuhan logistik awak *speedboat* dalam menunjang kegiatan operasi, dengan melengkapi awak dengan perbekalan maupun sarana keselamatan sehingga pelaksanaan patroil lebih optimal;

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan indeks kinerja operasi speedboat antara lain:

1. Melaksanakan perawatan dan pemenuhan suku cadang dalam menjaga performa armada. Secara teori, keberhasilan atas IKU ini bergantung kepada kelayakan operasi armada speed sehingga perlu diperhatikan komponen yang menunjang semisal performa mesin maupun suku cadang serta peralatan keselamatan, kondisi ini akan menentukan sejauh mana perawatan dan pemeliharaan akan dilakukan;
2. Mengidentifikasi armada yang sudah tidak dapat beroperasi, armada yang sudah tidak layak guna segera dilaksanakan pelaporan sehingga tidak lagi memperoleh anggaran operasi yang nantinya bisa menghambat pencapaian kinerja;

Realisasi anggaran yang dicapai dalam mendukung capaian Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah sebesar Rp. 13.971.000,- atau sebesar 3,60% dari total pagu yang dianggarkan. Capaian hari seluruh armada *speedboat* yang tersebar di seluruh satwas dan wilker Stasiun PSDKP Belawan selama triwulan I telah melaksanakan 7 hari operasi dari total keseluruhan 2 armada speedboat pengawasan dan melaksanakan pemeriksaan kepada 13 KII.

1 Armada Stasiun PSDKP Belawan (Napoleon 028) berada dalam kondisi performa yang siap operasi dan 1 Armada berada dalam kondisi siap terbatas yaitu Doplhin 014 yang berada di satwas Asahan. Realisasi hari operasi armada speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan akan kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10. Realisasi armada speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Nama Kapal Pengawas/ Speedboat	TMT Operasi	Realisasi Hari Operasi	Kapal Diperiksa			Kapal Ditangkap			Lokasi Operasi (WPP)	Keterangan
				KII	KIA	JML	KII	KI A	JML		
1	Napoleon 028	30	2	3	-	3	3	-	3	571	Siap Operasi
2	DOLPHIN 014	30	5	10	-	10	-	-	-	571	Siap Terbatas

c. IKU 4: Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)

Indeks kinerja persentase pemenuhan logistik kapal pengawas merupakan IKU yang berbicara tentang aspek pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas meliputi logistik kapal dan logistik personal. Logistik kapal antara lain, BBM, Pelumas, dan Alat Pelayanan, sedangkan logistik personal meliputi, bahan makanan AKP, air bersih, senjata api.

Kegiatan pemenuhan logistik dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan dan dikatakan tercapai dengan beberapa kriteria yaitu tersedianya berita acara sisa BBM akhir bulan, dokumen pembelian pelumas atau berita acara sisa pelumas, dokumen pemenuhan bahan makanan, dokumen pemenuhan air bersih, dokumen pemenuhan atk dan bahan komputer, serta dokumen laporan senjata api dan amunisi.

FORMULA:

$$X_p = (30\% \cdot x_a) + (20\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c) + (15\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e) + (5\% \cdot x_f)$$

Keterangan:

- X_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)
- X_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)
- X_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)
- X_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)
- X_e : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)
- X_f : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

Pada triwulan I tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan berhasil memperoleh **capaian sebesar 100%**, sesuai dengan target yang ditetapkan pada PK 2024. Capaian ini diperoleh dengan ketentuan bahwa Stasiun PSDKP Belawan telah memenuhi setiap komponen logistik kapal maupun logistik personal.

Berdasarkan manual indikator kinerja maka indeks kinerja ini dianggap terpenuhi dengan berita acara tersebut. Untuk komponen logistik lainnya seperti pemenuhan natura, atk/cs, air bersih maka Stasiun PSDKP telah melaksanakan pemenuhan yang dibuktikan dengan dokumen permintaan maupun SPJ pembelian, dan untuk ketersediaan senjata dan amunisi didasarkan pada laporan ketersediaan senjata maupun amunisi oleh kapal pengawas. Indikator kinerja utama ini merupakan indikator baru sehingga belum dapat dibandingkan. Berikut tabel capaian indeks kinerja persentase pemenuhan logistik kapal pengawas.

Tabel 11 Capaian IK 4

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2024	TW I 2024	s/d TW I	TW I 2023
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100	-

Analisis penyebab keberhasilan atas IKU persentase pemenuhan logistik kapal pengawas antara lain dikarenakan;

- Melaksanakan monitoring atas kebutuhan kapal pengawas, monitoring dapat dilaksanakan melalui pengajuan kebutuhan logistik yang berasal dari awak kapal pengawas;
- Memastikan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas maupun logistik personil, telah memiliki dokumen yang sesuai. Stasiun PSDKP Belawan melalui mekanisme maupun petugas yang diberikan wewenang harus memastikan pemenuhan logistik atas kebutuhan kapal dan awak kapal terdokumentasikan dengan baik berupa pelaporan maupun pertanggungjawaban;
- Memastikan kebutuhan logistik kapal pengawas dapat terpenuhi minimal dalam setiap triwulan, Stasiun PSDKP Belawan melalui tim kerja Prasarana dan sarana operasi kapal pengawas wajib memastikan kebutuhan logistik kapal terpenuhi dengan monitoring dan tindak lanjut atas permohonan kebutuhan logistik yang diajukan kapal.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian IKU antara lain:

- Pemetaan kebutuhan kapal terkait pembiayaan, hal ini maksudkan agar Stasiun PSDKP Belawan dapat melakukan plot terhadap kebutuhan logistik kapal yang pembiayaannya dapat ditanggulangi dengan menggunakan mekanisme GUP, TUP ataukah LS, sehingga skala prioritas tetap dapat berjalan pemenuhan dapat terlaksana;

- Monitoring dan evaluasi kebutuhan kapal pengawas akan ketepatan dokumen yang dihasilkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas selama triwulan I tahun anggaran 2024 telah menghasilkan realisasi sebesar Rp. 9.348.284.856,- atau 97,99% dari total anggaran operasional sebesar Rp. 9.539.817.000,-.

2. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Sasaran kegiatan terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan menurunkan 1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)". IKU ini merupakan IKU lama yang sudah pernah dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan sebelumnya.

a. IKU 7: Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)

IKU Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan IKU yang berbicara tentang tupoksi organisasi dalam pengawasan kelautan. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilaksanakan oleh Polsus PWP3K. Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha kelautan berpedoman pada Peraturan yang berlaku sebagaimana jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. IKU ini terdiri atas beberapa jenis pengawasan kelautan diantaranya:

1. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
3. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya;
5. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Formula:

$$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- x_{sdk} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan
- X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i
- n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Tahapan pemeriksaan IKU 7

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : 1. Membuat jadwal pemeriksaan; 2. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; 3. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau 4. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usahan (tergantung sifat pengawasan), Daftar Pertanyaan (tergantung sifat pengawasan)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Tahun 2024 capaian IKU ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 100, sebagaimana target triwulan yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13. Capaian IKU 7

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2024	TW I	s/d	TW I
			2024	TW I	2023
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan instrumen pengawasan. Indikator kinerja ini memberikan batasan sehingga pengawasan yang merupakan tujuan utama dari organisasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak hanya merujuk kepada kaidah pengawaan akan tetapi tertib dalam pengadministrasian.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Stasiun PSDKP Belawan agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misalnya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
4. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih professional dan bertanggungjawab;
5. Segera melakukan pulbaket terkait laporan yang masuk, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat serta menambah target pengawasan insidental yang dilaksanakan;
6. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Adapun kendala dalam melaksanakan IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) antara lain:

1. Wilayah pengawasan yang jauh;
2. Kurangnya informasi pendahuluan terkait objek yang diawasi;
3. Adanya perbedaan persepsi terkait peraturan yang berlaku;
4. Benturan tradisi dengan peraturan yang masih perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan maupun jalur keagamaan.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Berikut kami sajikan rekapitulasi data pengawasan SDK selama Triwulan I tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Tabel 14. Rekap pemeriksaan SDK triwulan I

No	Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024	Realisasi TW I Tahun 2023
1	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau <i>Apendiks Cites</i> yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	1	1
2	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0	0
3	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	0
4	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	7	2
5	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	-	-
Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		10	3

Pengawasan dilaksanakan secara rutin maupun insidental dengan menggunakan longboat atau dengan kunjungan yang dapat diakses melalui perjalanan darat. Pengawasan perlu ditingkatkan dengan upaya komunikatif maupun dengan langkah sanksi administratif. Realisasi anggaran selama triwulan I tahun 2024 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 108.512.762,- atau 21,16% dari pagu sebesar Rp. 512.707.000,-.

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pencapaian kinerja triwulan I tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 7 Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Pada tahun 2024 target pencemaran yang harus dicapai sebanyak 30 lembaga.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan meliputi pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan. Perlu untuk diketahui bahwa pada wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan belum banyak terdapat pabrik atau industri skala besar yang berpotensi melakukan pencemaran.

Tabel 15. Rekap Pengawasan Pencemaran

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
PT. Medan Tropical Canning	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Medan Tropical Canning terletak di Jl. P. Kangean No. 3-5 KIM I, Kelurahan Marbar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan; - Perusahaan ini termasuk dalam kategori UPI yang bergerak dalam bidang unit pengolahan ikan yang melakukan kegiatan pengolahan ikan & udang; - Perusahaan ini memiliki NIB nomor 98120101920359 tanggal 5 Sept 2018; - UKL UPL nomor : 660/1078/BLH/III/2013 (04 April 2013) diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Medan; - Pengolahan air limbah dilakukan secara terpadu di PT. Kawasan Industri Medan; - Hasil uji kualitas air terakhir pada bulan November 2023 menunjukkan hasil tidak melebihi baku mutu air limbah atau berada di

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
PT. Suryawindu Pertiwi	<p>bawah nilai ambang batas (NAB).</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Surya Windu Pertiwi terletak di Dusun Barat Gampong Lipah Rayeuk Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh; - Perusahaan merupakan Pembudidaya ikan yang melakukan kegiatan Pembenihan Ikan Laut (Udang Vaname); - Perusahaan ini 8120101912489 terbit tanggal 28 Maret 2022 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; - UKL UPL nomor : 660/186 tanggal 18 September 2024 diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kab. Bireuen; - PT. Suryawindu Pertiwi telah melakukan pengelolaan limbah dan melakukan pengecekan kualitas air secara berkala setiap bulannya melalui Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I medan Kemenkes RI; - Hasil uji kualitas air terakhir pada bulan September 2023 menunjukkan hasil tidak melebihi baku mutu air limbah atau berada di bawah nilai ambang batas (NAB).
PT. Aquafarm Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengawasan pencemaran ini dilaksanakan tanggal 26 s.d 28 Maret 2024 di PT. Aquafarm Nusantara yang merupakan unit pembesaran ikan nila (<i>Oreochromis Niloticus</i>) pada lokasi sampling Keramba Jaring Apung (KJA) Pangambatan; - PT. Aquafarm Nusantara memiliki dokumen : <ul style="list-style-type: none"> a.NIB 8120015280138 dengan KBLI 03222 yang terbit tanggal 3 Desember 2018. b. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Nomor 660/4223/K/Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara. c.Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 15 Oktober 2009. - Perusahaan secara rutin melakukan pengujian kualitas air danau secara internal dan eksternal. Uji kualitas air secara internal dilakukan setiap bulan, sedangkan uji eksternal dilakukan oleh PT. Citra Lestari Enviro setiap 3 bulan. UPT. Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Samosir dan PT. Beta Julu Enviro Laboratorium melakukan uji kualitas air danau setiap semester;

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Uji kualitas air secara mandiri dilakukan terakhir pada bulan Februari 2024, PT. Citra Lestari Enviro bulan Desember 2023, UPT. Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Samosir bulan Oktober 2023 dan PT. Beta Julu Enviro Laboratorium pada bulan November 2023. Dimana semua hasil uji yang dilakukan tiap parameter dibawah baku mutu; - PT. Aquafam Nusantara rutin melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Gubernur Sumatera Utara setiap enam bulan sekali. - Upaya perusahaan untuk menjaga kualitas air danau dilakukan dengan cara: Menggunakan pakan terapung, penggunaan jala ganda, pengambilan ikan mati, pemantauan kualitas air yang bekerjasama dengan Wagenigen University (Belanda) serta bekerja sama dengan World Wide Fund for Nature (WWF) melalui Tilapia Aquaculture Dialogue; - Perusahaan memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3, dan menyerahkan limbah B3 ke pihak ketiga yang telah memiliki izin yaitu PT Amindy Barokah Medan - Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. Aquafarm Nusantara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran. - Dalam pengelolaan kualitas air Danau Toba, diperlukan sinergi dari pemerintah pusat dan daerah dalam pelestarian populasi ikan bilih (<i>Mystacoleucus padangensis</i>) di danau Toba, menerbitkan regulasi tentang alat penangkapan ikan, dan musim penangkapan. Ikan bilih merupakan herbivor yang memakan algae, sehingga berperan untuk pemulihan kualitas air danau. Saat ini penangkapan ikan bilih sudah over fishing. Perusahaan siap mendukung pemerintah dan berpartisipasi dalam restocking dan pelestarian ikan bilih di Danau Toba.
PT. Fuda Sari Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengawasan pencemaran ini dilaksanakan tanggal 26 Maret 2024 di PT. Fuda Sari Laut yang merupakan Unit Pengolahan Ikan yang melakukan kegiatan Pembekuan Ikan dan Biota Air Lainnya - PT. Fuda Sari Laut memiliki dokumen perizinan berupa: a.NIB: 8120315120371 terbit tanggal 7

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	<p>November 2018 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal; b.UKL-UPL Nomor: TL.T/439/VII/2018 terbit tanggal 8 Agustus 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang; c.IMB Nomor: 506.607/4708 tanggal 14 Desember 1989 diterbitkan oleh Sekretariat Wilayah Kabupaten Deli Serdang; d.Izin Lingkungan Nomor: 503.570/0172/IL/DPMPPTSP-DS/IX/2018 diterbitkan tanggal 18 September 2018 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang."</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan hanya melakukan pengujian air untuk air yang digunakan pada kegiatan pengolahan. Untuk limbah dari hasil kegiatan belum dilakukan pengujian kualitas air; - Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada PT Fuda Sari Laut tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungan; - Terkait pengujian kualitas air pada limbah pembuangan dan pengelolaan limbah B3, pengawas perikanan memberikan arahan agar segera dilakukan pengujian kualitas air pada air limbah setiap sebulan sekali dan menyerahkan limbah B3 ke Perusahaan yang memiliki izin agar limbah B3 tidak disalah gunakan.
PT. Seafood Sumatera Perkasa	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah dilakukan bersama oleh Stasiun PSDKP Belawan dan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal dilaksanakan tanggal 27 Maret 2024 di PT. Seafood Sumatera Perkasa di Jl. Titi Pahlawan No.38 Desa/Kelurahan Rengas Pulau, Kec.Medan Marelan, Medan - PT. Seafood Sumatera Perkasa memiliki dokumen : - a.NIB : 8120002962402 terbit tanggal 20 September 2018 - b.PKKPR nomor : 060822102112271115 terbit tanggal 6 Agustus 2022 oleh BKPM - c. UKL UPL nomor : 660/5993 diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Medan - d.IMB nomor : 0493/644.4/MMR/03/1999 (22 Maret 1999) diterbitkan oleh Pemerintah Kotamadya Tk. II Medan" - IPAL pada PT Seafood Sumatera Perkasa memiliki 6 bak penyimpanan air limbah untuk

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	<p>dilakukan treatment menggunakan bakteri pengurai secara berurutan dan kemudian diendapkan di dalam 3 tandon besar. Setelah di endapkan air tersebut digunakan kembali untuk kegiatan sanitasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil pengawasan, dokumen rencana pencegahan pencemaran telah sesuai dengan perizinan serta tersedia fasilitas pencegahan pencemaran. PT Seafood Sumatera Perkasa telah melakukan uji analisis limbah setiap bulan. - Untuk limbah padat seperti kepala, kulit sisik ikan diambil oleh teknisi (pihak ketiga)" - Tidak ditemukan indikasi pelanggaran
PT. Anugerah Global Maju	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Anugerah Global Maju (AGM) beralamat di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Koordinat 1. 421230N 102.057737N). Dengan usaha KBLI 03254-Pembesaran Crustacea Air Payau; - PT. AGM Telah memiliki NIB Nomor 0222000941478, Sertifikat Standar Nomor 0222000941478001 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); - Pengujian atas kualitas air dilakukan baik oleh Lab. PT Mabar Feed Indonesia dan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis secara berkala. Hasil yang diperoleh adalah tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran; - Dari hasil PULBAKET bersama ini, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis selaku Instansi penerbit Izin untuk dapat memantau perkembangan jumlah dan luasan kolam tambak milik perusahaan ini, karena apabila telah melebihi 10 Ha, maka dokumen lingkungan yang dipergunakan tidak lagi SPPL, namun berubah menjadi UKL-UPL
Koperasi Produsen Bumi Sukses Bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Koperasi Produsen Bumi Sukses Bersama yang beralamat di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Koordinat 1. 606200N 102.820070N). Dengan usaha KBLI 03254-Pembesaran Crustacea Air Payau - Koperasi ini Telah memiliki NIB Nomor 0112230024743, Sertifikat Standar Nomor 0112230024743001 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) - Pengujian atas kualitas air dilakukan baik oleh Lab. PT Indojoya Agrinusa dan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis secara

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	<p>berkala. Hasil yang diperoleh adalah tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil PULBAKET bersama ini, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis selaku Instansi penerbit Izin untuk dapat memantau perkembangan jumlah dan luasan kolam tambak milik perusahaan ini, karena apabila telah melebihi 10 Ha, maka dokumen lingkungan yang dipergunakan tidak lagi SPPL, namun berubah menjadi UKL-UPL

a.2 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pencapaian kinerja triwulan I Tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 2 pelaku usaha pemanfaatan ruang laut. Terdapat 2 target yang ditetapkan dan telah terpenuhi. Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri, dimana PKKPRL adalah perizinan dasar, selama pelaku usaha memanfaatkan ruang laut. pengawasan PKKPRL erat kaitannya dengan pengawasan budidaya dan pengawasan perikanan lainnya sehingga kedudukan perizinan PKKPRL sangat urgent diawasi untuk memastikan kelaikan dokumen lainnya.

Tabel 16. Rekap Pengawasan PRL

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut PT. Kawasan Industri Dumai (KID)	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Kawasan Industri Dumai (KID) merupakan kompleks industri yang dikelola oleh PT. KID itu sendiri. Memiliki NIB Nomor 8120202951843 dengan KBLI 68130-Kawasan Industri dan KBLI 35101-Pembangkit Tenaga Listrik, dan merupakan perusahaan dengan kategori* Penanaman Modal Asing (PMA)* . PT. KID merupakan Obyek Vital Nasional Sektor Industri berdasarkan SK Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 805/M-IND/Kep/12/2017 - PT KID juga telah memiliki Izin Lingkungan Nomor 296/KLH/2013 dari Walikota Dumai, dan PT. Kawasan Industri Dumai Telah memiliki Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor 28092210511400003, Tanggal 28 September 2022 dengan luas area 23,70 Ha. - PT. Kawasan Industri Dumai dinilai telah melaksanakan semua kewajiban kecuali membuat Laporan tertulis setiap 1 (satu)

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	<p>tahun kepada menteri, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Hak dan Kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen PKKPR. Adapun Laporan ini selanjutnya di-update oleh perusahaan telah dikirimkan pada Hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Hasil pemeriksaan di lapangan, seluruh bangunan fisik dermaga TERSUS milik PT.KID benar berada dalam koordinat PKKPR. Sedangkan pipa intake air laut yang dahulu dipergunakan pendingin turbin tenaga listrik sudah tidak lagi dipergunakan, sehingga tidak ada kewajiban perusahaan untuk mengurus izin penggunaan air laut selain energy (ALSE); - Telah melaksanakan semua kewajiban kecuali membuat Laporan tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada menteri, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Hak dan Kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen PKKPR. Adapun Laporan ini selanjutnya di-update oleh perusahaan telah dikirimkan pada Hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan - Polsus PWP3K tidak menemukan adanya pelanggaran.
EMP Gebang Ltd	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor EMP Gebang Ltd. yang berlokasi di Kab. Langkat, sedangkan pengembangan lapangan migas berlokasi di Desa Bubun, Kec. Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Prov. Sumatera Utara; - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) dengan Nomor: 11012210511200001 yang diterbitkan a.n Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 6 Januari 2022; - Adapun Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ialah 35115 dengan detail kegiatan usaha: Pengembangan Lapangan Migas Secanggang; - Memiliki Surat Rekomendasi Gubernur No: 522/529 perihal : Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi serta Sarana Pendukung Lainnya - SK Persetujuan Amdal No: SK.1042/MENLHK/SETJEN/PLA.4/9/2023

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	<p>tanggal 25 September 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas lapangan migas yang akan dikembangkan adalah 4,84 Ha ; - Pemeriksaan ke lapangan sesuai titik koordinat perizinan PKKPR, belum ada realisasi fisik dikarenakan perizinan kegiatan reklamasi masih berproses di Dit Jasa Kelautan, Ditjen PRL. Progres kegiatan EMP Gebang dalam Pengembangan Lapangan Migas Sicanggung sampai dengan saat ini sampai pada tahap membangun infrastruktur jalan dan pembangunan jalan penghubung melewati hutan, yang dijadwalkan selesai bulan Juni. Untuk perencanaan reklamasi dijadwalkan bulan Juni menunggu terbitnya izin reklamasi - Proses Pengembangan Lapangan Migas Sicanggung EMP Gebang berupa reklamasi sampai saat ini berproses sampai tahap asistensi terakhir dari TIM KKP PUSAT dalam rangka penerbitan izin reklamasi. - BUT EMP Gebang sudah menyampaikan laporan tahunan secara tertulis tahun 2023, tetapi laporan tahun 2024 belum disampaikan. Polsus PWP3K sudah menyampaikan supaya BUT EMP Gebang segera menyampaikan laporan tahunan. Note: Laporan Tahun 2024 sudah di laporkan tertanggal 29 Feb 2024

a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya

Pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 1 pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES. Apabila mengacu kepada target yang diberikan, Stasiun PSDKP Belawan belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 2 untuk pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES.

Kegiatan pendukung utama jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan meliputi Pengawasan Pengelolaan Jenis ikan yang dilindungi. Pengawasan ini belum termasuk dengan adanya laporan warga atau nelayan kecil yang mendapati adanya jenis ikan dilindungi yang tidak sengaja masuk dalam jaring atau tertangkap saat memancing.

Berbagai upaya telah dilakukan Stasiun PSDKP Belawan terhadap kegiatan pengawasan jenis ikan dilindungi sebagai bagian penyadartahuan kepada masyarakat terkait larangan dan tujuan pelarangan tersebut dan dampaknya bagi ekologi sekitar. Berikut merupakan tabel pengawasan jenis ikan dilindungi

Tabel 17. Rekap pengawasan jenis ikan dilindungi

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
<p>PT. Dahlia Mekar Lestari (DML)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Dahlia Mekar Lestari (DML) yang beralamat di Desa Wonosari tengah, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Prov. Riau - Jenis Ikan yang dimanfaatkan oleh perusahaan ini adalah Arwana Kalimantan (<i>Scleropages formosus</i>) dan Arwana Irian (<i>Scleropages jardini</i>). - Perusahaan ini memiliki tiga lokasi pengembangbiakan yaitu di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar dan Kantor Pusat di Kota Pekanbaru. Keseluruhan lokasi tersebut berada pada Provinsi Riau - PT. DML di lokasi Kab. Bengkalis ini hanya untuk tujuan pengembangbiakan, untuk proses pemeliharaan selanjutnya dilakukan di Kota Pekanbaru - Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104202128 Tanggal 22 Februari 2019, dengan KBLI 03271 –Pengembangbiakan Ikan Bersirip yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES, Dengan Kalsifikasi Resiko Tinggi. Adapun Status penanaman modal adalah PMDN. - Surat Izin Pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) pengembangbiakan Nomor I-202110131440307956328 yang berlaku hingga Tahun 2026 - Dokumen Izin Edar Luar Negeri Nomor SK.303/KSDAE/SET/KSA.2/7/2019 yang berlaku hingga Bulan Juli 2024, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) - Dokumen Izin Edar Dalam Negeri Nomor SK.232/KSDAE/SET.3/KSA.2/7/2021 yang berlaku hingga Bulan Juli 2026, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) - Petugas belum menemukan adanya Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) di lokasi ini, penanggung jawab menyampaikan bahwa semua dokumen tersebut, termasuk untuk lokasi lainnya terdapat di kantor pusat di Kota

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	Pekanbaru - Hasil konsultasi dengan Ibu Hasneli, S.Pi selaku koordinator Kantor Karantina ikan Bengkalis menyampaikan bahwa PT. DML selalu mengurus HC dengan melampirkan SAJI apabila akan melakukan perpindahan ikan dari Kab.Bengkalis ke Kota Pekanbaru - Disimpulkan bahwa usaha ini legal karena memiliki izin pengembangbiakan maupun perdagangan dari Pemerintah Indonesia yang masih berlaku

a.4 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan

Pada TW I Tahun 2023, belum ada dilaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan. Rencananya kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha ini akan dilaksanakan pada TW II Tahun 2024. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan 1 target pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan.

a.5 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Kegiatan pengawasan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak merupakan kegiatan yang baru ada pada RKAKL tahun 2024 di Stasiun PSDKP Belawan. Pada TW I tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan belum ada melaksanakan kegiatan pengawasan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan 15 target pemeriksaan terhadap pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku Usaha perikanan yang bebas dari kegiatan Destructive Fishing meliputi pengawasan pada kapal – kapal dibawah 10 GT, dan supervisi kegiatan pengawasan di Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

3. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan menurunkan 1 IKU yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)". IKU ini merupakan IKU lama yang sudah berjalan sejak tahun 2023. IKU ini merupakan penjabaran atas tugas pengawasan dan satu-satunya indikator kinerja pada bidang pengawasan sumber daya perikanan.

a. IKU 8: Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)

IKU Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai) merupakan IKU lama yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja Stasiun PSDKP Belawan dalam tugas pengawasan sumber daya perikanan. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Formula:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- x_{sdp} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
- X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i
- n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Tabel 18. Pemeriksaan IKU 8

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis resiko), Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pelaksanaan pengawasan terhadap IKU ini terbagi atas 4 (empat) kegiatan pengawasan diantaranya:

1. Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan;
2. Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan;
3. Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan;
4. Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan.

IKU ini dapat dicapai Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai yang sangat memuaskan yaitu dengan nilai 100 dan persentasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam melaksanakan pengawasan yang mendukung IKU ini pengawas perikanan berpedoman kepada Perdirjen 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Perdirjen tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan secara teknis, dan terdapat berbagai peraturan lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan yang erat hubungannya dengan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Berikut tabel capaian indikator kinerja 6.

Tabel 19. Capaian IKU 8

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2024	TW I	s/d	TW I
			2024	TW I	2023
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan diantaranya;

1. Melengkapi Pengawas Perikanan dengan sarana dan pengawasan yang memadai dalam menjalankan tugas sehingga tugas menjadi optimal, semisal penggunaan vernier caliper, alat transportasi, kamera bawah air, dll;
2. Membangun komunikasi yang baik dengan *stakeholder* sehingga pengawasan dapat berjalan dengan lancar, hal ini dimaksudkan pengawas perikanan harus memiliki kemampuan verbal yang baik sehingga penyampaian pesan dan maksud serta tujuan pengawasan dapat dipahami dengan baik, serta meminimalisir konflik mengingat kegiatan pengawasan berpotensi mewajibkan pengawasan perikanan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai latar belakang;
3. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan informasi dan persiapan telah ditetapkan pada saat kegiatan perencanaan;
4. Mengumpulkan informasi pendahuluan yang bersumber dari kegiatan pengawasan sebelumnya ataupun dari informasi yang telah dikumpulkan pengawas perikanan dari masyarakat atau dari dinas terkait tentang unit yang akan diawasi;
5. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, seperti internalisasi regulasi maupun kebijakan terbaru yang telah ditetapkan;
6. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan sehingga tidak ada benturan ketika pengawasan dilaksanakan;
7. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan juga dihadapkan dengan berbagai masalah yang menghambat diantaranya:

1. Masih terdapat kendala dalam pelayanan secara online;
2. Masih banyak *stakeholder* yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi online dalam pelayanan.

Analisa kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU ini diantaranya;

1. Pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi terkait regulasi terkini, serta isu terkait pengawasan sumber daya perikanan;
2. Melakukan perencanaan dan revisi atas perubahan kegiatan atau adanya penambahan yang sifatnya urgent.

Sepanjang triwulan I tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 lembaga. Pengawasan sumber daya perikanan yang kegiatannya mendukung pencapaian IKU ini turut menyumbang realisasi sebesar 14,22% atau sebesar Rp. 152.427.250,- dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 1.072.000.000,-. Berikut kami sajikan tabel rekapitulasi total pengawasan sumber daya perikanan.

Tabel 20 Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan

NO	BULAN	PENANGKAPAN	BUDIDAYA	PENGOLAHAN	PEMASARAN	Total
1	Januari	0	1	0	11	12
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	0	3	3	0	6
	Total	0	4	3	11	18
	Target					150

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan

Pada TW I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan belum ada melaksanakan Pengawasan terhadap pelaku usaha kapal perikanan namun Stasiun PSDKP Belawan melakukan pelayanan terhadap penerbitan SLO. Selama kurun waktu triwulan I Stasiun PSDKP Belawan telah menerbitkan 5.365 SLO dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21 Rekapitulasi Penerbitan SLO

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	2024								
		E - PIT			NON PIT			JUMLAH		
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO
		D	B		D	B		D	B	
1	Stasiun PSDKP Belawan	282	347	347	572	608	608	854	955	955
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)	-	-	-	47	70	70	47	70	70
3	Kabupaten Bengkalis	-	-	-	94	100	100	94	100	100
4	Kabupaten Kepulauan Meranti	-	-	-	18	17	17	18	17	17
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)	15	51	51	153	163	163	168	214	214
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai	-	-	-	77	77	77	77	77	77
7	Satwas PSDKP Langsa	-	-	-	197	197	197	197	197	197
8	Kabupaten Aceh Timur	30	39	39	665	730	730	695	769	769
9	Kota Lhokseumawe	-	-	-	558	563	561	558	563	561
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)	-	-	-	244	244	244	244	244	244
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)	-	-	-	234	234	234	234	234	234
12	Kabupaten Pidie	-	-	-	98	141	141	98	141	141
13	Kabupaten Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	32	49	43	1.577	1.746	1.743	1.609	1.795	1.786
15	Kabupaten Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	359	486	480	4.534	4.890	4.885	4.893	5.376	5.365

a.2 Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan

Pengawasan terhadap UPI dilaksanakan selama triwulan I Tahun 2024 kepada 3 Pengusaha dengan metode pengawasan rutin maupun insidental. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 22. Rekap Pengawasan Pengolahan

No	Nama Perusahaan / Perorangan	Kode Proyek / KBLI	Jenis Pengawasan	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)	Rekomendasi
1	PT MEDAN TROPICAL CANNING AND FROZEN INDUSTRIES	202008-0108-4016-7912-262	OSS	Nilai tingkat kepatuhan untuk KBLI 10293 yaitu 100 % (baik sekali)	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
2	PT MEDAN TROPICAL CANNING AND FROZEN INDUSTRIES	201912-2322-2137-0901-661	OSS	Nilai Kepatuhan teknis KBLI 10213 yaitu 100 % (Baik Sekali)	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
3	PT MEDAN TROPICAL CANNING AND FROZEN INDUSTRIES	202008-0516-2816-8808-392	OSS	Nilai kepatuhan teknis KBLI 10219 yaitu 100 % (Baik Sekali)	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan

Pengawasan terhadap distribusi dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2024 kepada 11 Pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan berikut gambar dan tabelnya.

Tabel 23. Rekap Pengawasan Distribusi/ Pemasaran

No	Nama Perusahaan / Perorangan	Kode Proyek / KBLI	Jenis Pengawasan	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)
1	CV CTK	-	Insidental / Lainnya	Tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran
2	CV. Karya Laut	-	Insidental / Lainnya	Nilai Kepatuhan Teknis KBLI 46206 sebesar 98,75 % dengan kategori baik sekali. Tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.
3	CV Bahagia	-	Insidental / Lainnya	Tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran
4	PT. Sunarkho Mekar Jaya Abadi	-	Insidental / Lainnya	untuk Realisasi Ikan Salem sebanyak 418.317 kg, dan sisa 81.516 kg, sedangkan ikan Kuring terealisasi sebanyak 249.490 kg, dan sisa 510kg
5	CV. Sumber Laut Abadi	-	Insidental / Lainnya	Nilai Kepatuhan Teknis KBLI 46206 sebesar 98,75 % dengan kategori baik sekali. Tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran
6	CV. SELAT MALAKA FROZEN	-	Insidental / Lainnya	berdasarkan hasil Monitoring, Ikan Salem dan Kuring sudah habis

				teralisasi, sedangkan Ikan Aso aso tersisa 5.600kg
7	PT. Putri Manalu Bersaudara	-	Insedentil / Lainnya	Seluruh kegiatan distribusi telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dengan melengkapi dokumen PI, PIB, SKP, sertifikat Kesehatan Ikan dari Negara Asal
8	PT. Assa Belawan	-	Insedentil / Lainnya	Penilaian Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha KBLI 46206 sebesar 87,4 %
9	Intalasi Karantina Ikan PT Karunia Samudera Hindia	-	Insedentil / Lainnya	Pengawasan Distribusi Ikan impor dilakukan pada Instalasi Karantina Ikan PT Kasahi di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, pendistribusian hanya dilakukan ke UPI PT Kasasi yang berlokasi di Kecamatan Sarudik Kabupaten Deli Serdang. Pendistribusian menggunakan Truk berpendingin. Dari hasil pemeriksaan dan analisa, ikan impor dari IKI PT Kasahi ke UPI PT Kasahi tidak digunakan untuk tujuan lain. Penilaian Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha menunjukkan hasil yang Baik Sekali dengan nilai kepatuhan sebesar 84,75%.
10	PT. Yasuriang Samudera Rezeki	-	Insedentil / Lainnya	berdasarkan hasil pengawasan terdapat laporan stok produksi habis terealisasi. dan berdasarkan secara teknis tidak terdapat laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
11	CV. Samudera Marine Fish	-	Insedentil / Lainnya	CV. Samudera Marine Fish pada tahun 2023 mendapatkan kuota impor sebesar 1,500.000 Kilogram melakukan Kegiatan Impor CV. Samudera Marine Fish hingga 29 November 2023 telah terealisasi sebanyak 1.498.317 Kilogram. Kuota impor yang tersisa untuk periode 2023 sebanyak 1.683 Kilogram. Ikan impor didistribusikan kepada industri pemindangan yang berada di wilayah Sumatera Utara – Sibolga. Dari hasil skoring, nilai kepatuhan CV. Samudera Marine Fish (KBLI 46206 – Perdagangan Besar Hasil Perikanan mendapatkan skor 84.75% dengan kategori BAIK SEKALI.

a.4 Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan

Pengawasan terhadap budidaya dilaksanakan selama triwulan I Tahun 2024 kepada 4 pelaku usaha. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 24. Rekap pengawasan budidaya

No	Nama Perusahaan / Perorangan	Kode Proyek / KBLI	Jenis Pengawasan	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)	Rekomendasi
1	PT SURYAWINDU PERTIWI	202203-2622-0120-0506-861	OSS	Penilaian Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha KBLI 03212 sebesar 55.00 dan Penilaian administrasi 38.18 Sehingga Total Nilai Kepatuhan 93,18 (Baik Sekali)	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
2	JEREMIA TARIGAN	-	Insedentil / Lainnya	berdasarkan nilai kepatuhan teknis pelaku usaha KBLI 03224, dengan bobot penilaian 71,1% dengan nilai kepatuhan usaha Baik Sekali. catatan dalam perbaikan penilaian kepatuhan KBLI 03224 belum adanya pelaporan kegiatan usaha dan belum melakukan monitoring tindaklanjut yang terdokumentasi.	Pembinaan dan Perbaikan
3	FIRDAUS	202207-0410-2455-1111-963	Insedentil / Lainnya	Usaha budidaya ini telah memiliki perizinan berusaha tetapi salah KBLI seharusnya 03221 bukan 03229. Diperlukan pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur untuk memenuhi sistem manajemen usaha. Usaha budidaya ini menggunakan pakan HI Provite 781, 781-1 yang telah terdaftar di KKP. Usaha ini tidak menggunakan obat/vitamin apapun .Benih berasal dari BBI Bangkinang yang sudah bersertifikasi CPIB.	Pembinaan dan Perbaikan
	OGI ASEENDO	202212-0511-5320-4235-843	Insedentil / Lainnya	Usaha budidaya ini telah memiliki perizinan berusaha tetapi salah KBLI seharusnya 03221 bukan 03229. Diperlukan pencatatan kegiatan	Pembinaan dan Perbaikan

4			<p>usaha dalam rangka mampu telusur untuk memenuhi sistem manajemen usaha. Usaha budidaya ini menggunakan pakan HI Provite 781, 781-1 yang telah terdaftar di KKP. Obat yang digunakan yaitu EM\$ Perikanan yang telah terdaftar di KKP. Benih berasal dari BBI Bangkinang yang sudah bersertifikasi CPIB.</p>	
---	--	--	--	--

4. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang berorientasi kepada peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan menurunkan 2 indikator kinerja utama, IKU tersebut antara lain:

1. Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks).

a. IKU 9: Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Stasiun PSDKP Belawan untuk;

1. pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
2. pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x* : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
- a* : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
- b* : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai indeks 80 atas IKU ini berdasarkan perhitungan di atas. Total Stasiun PSDKP Belawan menyelesaikan 12 dari 14 kasus pengenaan administrasi yang terdiri dari 8 Kasus SPKP dan 4 Kasus Pelanggaran Perizinan sedangkan 2 Kasus Pelanggaran Perizinan masih dalam tahap proses pemanggilan untuk permintaan klarifikasi. Berikut kami sajikan tabel capaian dan tabel rekapannya.

Tabel 25. Capaian IKU 9

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2024	TW I 2024	s/d TW I	TW I 2023
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	40	80	80	80	100

Tabel 26. Rekap pengenaaan sanksi administratif

Perhitungan Capaian Sanksi Administrasi SPKP																		
NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)							ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						CAPAIAN IKU	
		TRANSSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	IZIN HABIS			JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	PROSES BAP / SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	SP1	SP2	DENDA		PIDANA
						<30 hari	>30 hari	Total										
1	BELAWAN	-	-	-	8	-	-	-	8	-	8	4	-	4	-	-	-	100%
	TOTAL	-	-	-	8	-	-	-	8	-	8	4	-	4	-	-	-	100%

NO	TGL PEMERIKSAAN	NAMA KAPAL PEMERIKSA	LOKASI PEMERIKSAN	NAMA KAPAL TERPERIKSA	NAMA PEMILIK KAPAL	GT KAPAL	LOKASI KAPAL	NAMA NAKHODA KAPAL	API	JENIS PELANGGARAN	SURAT PERINTAH KLARIFIKASI		BAP KLARIFIKASI				SANKSI ADMINISTRASI
											NOMOR	TANGGAL	PEMILIK		NAKHODA		
													TGL	PETUGAS KLARIFIKASI	TGL	PETUGAS KLARIFIKASI	
1	11 Maret 2024	KP. Hiu 08	Perairan Selat Malaka	BINTANG TERANG	TJENG SAN	24	TBA	Amat Kasim Nasution	Pukat Labuh	SIPI habis masa berlaku, tanpa dilengkapi SLO dan SPB	B.723/PSDKPSta.2/TU.330/III/2024	13/Mar/24	18/Mar/24	BENARDO NABABAN			SP I
2	18 Maret 2024	KP. Hiu 01	Perairan Selat Malaka	SELAMAT JADI XXXII	WILSON ALLEN YOUNG	18	Belawan	Riswanto	Pancing Cumi	Melanggar DPI diatas 12 mill							
3	18 Maret 2024	KP. Hiu 01	Perairan Selat Malaka	SELAMAT JADI XXXI	YUKI AGUSTWO	12	Belawan	Hamdani	Pancing Cumi	Melanggar DPI diatas 12 mill							
4	15 Maret 2024	KP. Hiu 01	Perairan Selat Malaka	MAHKOTA -38	CALVIN	19	Belawan	Mhd Iman	Pancing Ulur	Melanggar DPI diatas 12 mill	B.827/PSDKPSta.2/TU.330/III/2024	25/03/24	25/Mar/24	DENGGAN M. ILMU			SP I
5	18 Maret 2024	KP. Hiu 01	Perairan Selat Malaka	SUMBER LAUT	SUHENDRA	30	Belawan	Usman Ginting	Purse Seine	Melanggar DPI diatas 12 mill	B.828/PSDKPSta.2/TU.330/III/2024	25/03/24	25/Mar/24	INGRIKA R. KABAN			SP I
6	15 Maret 2024	KP. Hiu 08	Perairan Selat Malaka	MITRA SEJATI - 58	HU JU	12	Belawan	Edi Saputra	Pancing Ulur	SIPI habis masa berlaku, tanpa dilengkapi SLO dan SPB, melanggar DPI diatas 12 mill	B.808/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024	21/03/2024			21/Mar/24	FITRI ZULIANA	SP I

Analisa penyebab keberhasilan IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan, awak kapal pengawas, maupun polsus PWP3K yang melaksanakan tugas agar professional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan secara internal sebagai bagian penguatan kompetensi dan sharing session;
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti ketika melaksanakan pengawasan baik ketika kedatangan kapal, keberangkatan kapal, pengawasan perizinan berusaha maupun pemeriksaan ketika sedang melaksanakan gelar operasi.
3. Melaksanakan pengawasan dan penginformasian secara merata sehingga pendekatan persuasif telah dibangun sebagai dasar penetapan sanksi administrasi dikemudian hari apabila ditemukan pelanggaran;
4. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;

Kegiatan pengenaan sanksi administratif selama triwulan I tahun 2024 telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 106.202.668,- atau sekita 33,93% dari total pagu Rp.313,000,000,-.

5. Sasaran kinerja 8: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran kinerja ini menurunkan 14 indikator kinerja yang telah ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024. 14 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian. 14 indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
2. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
3. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (nilai);
4. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%);
5. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
6. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
7. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;

8. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
9. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (inovasi);
10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
11. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
12. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
14. Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;

Selama kurun waktu triwulan I Stasiun PSDKP Belawan melakukan penilaian terhadap 3 indikator kinerja manajerial yang dinilai secara triwulan yaitu point 1,7, dan 10.

a. IK 12: Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan;

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).

Formula:

Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:

$$x_{ikm} = x_1$$

x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP

x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu SLO. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada triwulan I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai 88,04 dari target 80. **Pencapaian IKU ini dilakukan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna jasa di seluruh unit kerja yang ada di Stasiun PSDKP Belawan serta memberikan pelayanan publik yang profesional kepada pengguna jasa.** Berikut kami sampaikan tabel capaian perhitungan indikator kinerja dimaksud.

Tabel 27. Capaian IK 12

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2024	TW I 2024	s/d TW I	TW I 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	80	80	88,04	88,4	89,48

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;
2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang nyaman.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain

1. Perawatan Gedung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa;
2. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan;
3. Internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada para Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K melalui kegiatan apel pagi sehingga memupuk kesadaran dan aktualisasi dalam melaksanakan pelayanan.

b. IK 15: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan

yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi

b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengendalian resiko dan dipantau oleh tim sesdit terkait kelengkapan data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Stasiun PSDKP Belawan **sebesar 100 dari target 100 pada triwulan I tahun 2024**. Pencapaian ini dikarenakan seluruh tahapan resiko pada Stasiun PSDKP Belawan telah dilaksanakan dan telah terdokumentasikan serta telah diverifikasi. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 28. Capaian IK 15

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I 2024	2024	TW I 2024	s/d TW I 2023	TW I 2023
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;
2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut;
3. Mengarsipkan dokumen manajemen resiko.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar evaluasi kegiatan sebelumnya.

c. IK 21: Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 2 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Keikutsertaan: Pimpinan UPT Stasiun PSDKP Belawan, Kepala Subbagian Umum, dan seluruh KaTimja;
- Keaktifan: Pimpinan UPT Stasiun PSDKP Belawan, Kepala Subbagian Umum, dan seluruh KaTimja.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi coffee dengan target 94% pada triwulan I Tahun 2024. Capaian IK Stasiun PSDKP Belawan sebesar 120%. Perhitungan capaian Persentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada triwulan I Tahun 2024 mengadopsi perhitungan data yang diberikan oleh Eselon I. Capaian pada triwulan ini sangat optimal dan memenuhi unsur 5w1h, hal ini dikarenakan keaktifan akun coffee dipantau secara berkala dengan memberikan notes atas serangkaian kegiatan yang memenuhi kriteria agar dapat diposting. Berikut kami sajikan data capaian dalam bentuk tabel.

Tabel 29. Capaian IK 21

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I 2024	2024	TW I 2024	s/d TW I 2023	TW I 2023
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	94%	94%	120%	120%	85,19%

Analisa keberhasilan pencapaian indeks kinerja ini antara lain:

- Mendukung pencapaian indeks kinerja dengan melakukan monitoring keaktifan internal oleh operator Coffice yang diinformasikan melalui WAG agar ditindaklanjuti oleh pemegang akun;
- Memberikan catatan atas kegiatan yang telah terlaksana lingkup Stasiun PSDKP Belawan baik kegiatan teknis maupun majerial agar history kegiatan dapat dituangkan ke dalam aplikasi coffice;
- Keterlibatan pimpinan yang aktif dalam memantau dan memacu keaktifan pemegang akun untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IK ini adalah

- Keaktifan Stasiun PSDKP Belawan dalam berpartisipasi dalam kegiatan eksternal dalam mendukung kinerja organisasi;
- Melaksanakan kegiatan internal yang aktif dalam mendukung capaian kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2024 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2024 tanggal 24 November 2023, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 36.669.969.000,-. Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah memiliki realisasi sebesar Rp. 14.626.681.021 atau 42,08% berdasarkan data OMSPAN.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama triwulan I Tahun 2024, kinerja Stasiun PSDKP Belawan telah mencapai hasil yang baik. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pada Tahun 2024, terdapat 25 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Tahun triwulan I tahun 2024 dengan nilai NKO sebesar 106,96. Selama kurun waktu triwulan I UPT Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan penilaian terhadap 9 Indikator Kinerja. 3 IK biru (istimewa) 6 IK lainnya berstatus hijau (baik).

B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian – bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada periode triwulan II Tahun 2024. Saran dan Rencana untuk memperbaiki capaian IKU pada Tahun 2024 terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 30. Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Periode Tahun 2024

No	Saran	Rencana Aksi	Waktu
1	Melaksanakan kontrol terhadap capaian IK IP ASN	<ul style="list-style-type: none">• Mengadakan kroscek data berdasarkan capaian IP ASN pada aplikasi berbasis web.• Melakukan penyampaian melalui WAG agar setiap pegawai dapat memenuhi kewajiban dalam pemenuhan IP ASN	<ul style="list-style-type: none">• Triwulan II